

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan bisnis atau usaha, sebuah perusahaan memiliki tujuan memperoleh keuntungan dan kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, perusahaan perlu membuat perencanaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan nilai suatu entitas adalah dengan menjaga kesehatan entitas itu sendiri. Kesehatan suatu perusahaan tercermin dari kemampuannya untuk bertahan di berbagai situasi dan kondisi, yang tercermin dalam kemampuan perusahaan membayar utang, menjalankan operasi secara stabil, dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. (Muhamad, Anisa, Venita Sofiani, dan Acep Suherman (2022)). Kinerja keuangan menjadi alat ukur dalam menilai kesehatan perusahaan, kinerja keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2013, laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari, yaitu: 1) laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2) laporan

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, 3) laporan perubahan ekuitas selama periode, 4) laporan arus kas selama periode, 5) catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi serta informasi perbandingan mengenai periode terdekat, dan 6) laporan keuangan pada awal periode terdekat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Tujuan utama pelaporan financial perusahaan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal laporan keuangan. Bagi pengguna internal seperti pemilik dan manajemen, laporan keuangan berfungsi memberikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dasar evaluasi bisnis, dan alat control internal. Bagi pihak eksternal seperti pemerintah, investor, kreditor, maupun supplier laporan keuangan berfungsi untuk memudahkan mereka mengetahui perkembangan, perubahan informasi keuangan, dan prospek masa depan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu disusun dan di analisis secara kritis dan menyeluruh. Menurut Sujarweni, analisa laporan keuangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan serta kinerja operasionalnya baik di masa lalu maupun di masa mendatang. (Muhamad et al., 2022). Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam keuangan perusahaan yang berpotensi menimbulkan masalah dimasa depan serta menentukan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, analisa yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan dapat digunakan untuk menentukan kredibilitas dan potensi investasi bagi investor (Rusdiono, 2019).

Alat analisa laporan keuangan yang dapat menggambarkan kesehatan perusahaan adalah rasio keuangan (Adawiyah, 2019). Menurut James C. Van Horne rasio keuangan adalah alat yang membandingkan dua angka akuntansi dengan membagi satu angka dengan yang lain, untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan di antara kedua angka tersebut (Kasmir, 2019). Irham Fahmi (2012:109) dalam penelitian Rusdiono (2019) mengemukakan manfaat dari penggunaan rasio keuangan, yaitu: 1) sebagai alat penilaian kinerja dan prestasi perusahaan, 2) sebagai alat perencanaan bagi manajemen, 3) alat evaluasi kondisi perusahaan dari prespektif keuangan, 4) bagi para kreditor digunakan untuk melihat potensi resiko terhadap jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman, dan 5) sebagai standar penilaian bagi *stakeholder* organisasi.

Setiap entitas usaha, baik entitas swasta atau entitas milik negara, perlu menunjukkan kinerja keuangan yang optimal sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung. BUMN merupakan agen pembangunan serta penggerak pertumbuhan ekonomi melalui sektor kunci seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, transportasi dan sektor ekonomi vital lainnya. BUMN berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui kontribusinya dalam sector kunci, BUMN menciptakan lapangan kerja dan menyediakan layanan public yang vital. Ada dua jenis BUMN di Indonesia, yang pertama dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) dan yang kedua dalam bentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan perseroan adalah jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas, di mana modalnya terbagi dalam bentuk saham dan setidaknya 51 persen (%) dari saham tersebut dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Penilaian kinerja BUMN dapat diukur dengan analisis perhitungan rasio keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 ada delapan indikator penilaian tingkat kesehatan perusahaan, yaitu (1) imbalan kepada pemegang saham (ROE), (2) imbalan investasi (ROI), (3) rasio lancar, (4) *collection periods* (CP), (5) rasio kas (*Cash Ratio*), (6) perputaran persediaan, (7) perputaran total asset (TATO), dan (8) rasio total modal sendiri terhadap total asset (TMS terhadap TA).

Berdasarkan informasi dari *website* Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2023), dalam perihal peningkatan kinerja dan nilai tambah, kementerian BUMN terus melakukan penyederhanaan portofolio jumlah BUMN melalui restrukturisasi korporasi, pada tahun 2022 terdapat 41 BUMN yang terbagi ke dalam BUMN Persero dan BUMN Perum yang tersebar dalam 12 klaster BUMN. Salah satu klasternya adalah jasa infrastruktur yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam klaster infrastruktur terdapat empat perusahaan BUMN konstruksi atau disebut BUMN Karya yang dinyatakan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI), diantaranya PT Adhi Karya Persero Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya Persero Tbk. (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. (WIKA).

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus SARS-COV2 dan menyebar

secara global dengan kecepatan yang tinggi (Daashrart et al., 2020 dikutip dalam Mustikaningrum dan Herawati (2022)). Lembaga kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020 dan mempengaruhi seluruh sektor dalam masyarakat (Mustikaningrum & Herawati, 2022). Kasus pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, yang dalam waktu singkat menyebar secara cepat ke berbagai wilayah Indonesia (Prasetya & Suropto, 2022). Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi interaksi antar masyarakat. Pembatasan social dan mobilitas ini menyebabkan melemahnya ekonomi, keterbatasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya membuat kemampuan memenuhi kewajibannya menjadi terganggu. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), selama triwulan III tahun 2020 Usaha Mikro Kecil (UMK) mengalami penurunan pendapatan sebesar 66,77 % sedangkan untuk Usaha Menengah Besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan sebesar 57,29 %. Pandemi COVID-19 telah melemahkan berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali sektor konstruksi (Prasetya & Suropto, 2022). Pembatasan social yang berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tentunya membuat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi mengalami penghentian dan penundaan pekerjaan, yang akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah salah satu perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Maret 1960 dan kemudian menjadi BUMN. Pada tahun 2004, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menjadi perusahaan

konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan melunasi kewajiban dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan (Adawiyah, 2019). Berikut ini disajikan laba bersih dan kewajiban PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam lima tahun terakhir, sebelum COVID-19 (2018 dan 2019), saat COVID-19 (2020 dan 2021), dan setelah COVID-19 pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 1. 1 Laba Bersih dan Kewajiban PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 2018-2022

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Kewajiban (Rp)
2018	645.029.449.105	23.806.329.077.039
2019	665.048.421.529	29.681.535.534.528
2020	23.702.652.447	32.519.078.179.193
2021	86.499.800.385	34.242.630.632.194
2022	175.209.867.105	31.162.625.753.138

Sumber: <https://adhi.co.id/> (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perkembangan laba bersih dan total kewajiban dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. periode 2018-2022. Pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatatkan laba sebesar Rp 645 miliar. Pada tahun 2019, laba bersih yang dicatatkan meningkat sebesar 3,1% menjadi Rp 665 miliar dari sebelumnya Rp 645 miliar. Pada tahun 2020 saat pandemi terjadi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatatkan laba yang turun secara signifikan dimana laba bersih menurun tajam 96,4% menjadi Rp 23,7 miliar dari yang sebelumnya Rp 665 miliar. Tahun 2021 ketika pandemi masih terjadi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berhasil mencatatkan kenaikan laba sebesar 265%, yang sebelumnya Rp 23,7 menjadi Rp 86,5 miliar. Peningkatan laba signifikan juga terjadi di tahun 2022 ketika perekonomian sudah kembali normal dan tidak ada pembatasan interaksi social,

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatatkan laba bersih senilai Rp 175,2 miliar dan nilai ini meningkat 102% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 kewajiban yang dicatatkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bernilai Rp 23,8 miliar. Pada tahun 2019 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mencatatkan kewajiban senilai Rp 29,6 triliun nilai ini naik 24,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2020, total kewajiban atau total liabilitas dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019, kenaikan ini didominasi oleh kenaikan pendapatan diterima dimuka dan kewajiban jangka panjang berupa liabilitas imbalan pemberi kerja. Kewajiban pada tahun 2021 meningkat 4,8% menjadi Rp 34,2 triliun dari yang sebelumnya Rp 32,5 triliun. Walaupun terjadi kenaikan kewajiban pada tahun 2021, pada tahun 2022 kewajiban dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengalami penurunan 8,9%, dimana angka kewajiban yang dicatatkan menjadi yang terkecil setelah tahun 2018 dan 2019.

Peneliti menggunakan rujukan utama dari penelitian Tasya Vesta Darma dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Provinsi Sumatera Barat: Kasus Pada PT X”. Pada rujukan ini, peneliti melakukan analisis laporan keuangan di salah satu BUMN yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan periode dari tahun 2015-2017. Pengembangan yang peneliti ambil pada rujukan ini adalah pengembangan sampel penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang tergolong dalam perusahaan non-infrastruktur dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan pengembangan dengan menambah lama periode dengan factor perubahan lingkungan berupa pandemi COVID-19. Pada penelitian terdahulu terdapat

keterbatasan dimana peneliti menganalisis laporan dalam kurun waktu tiga tahun, sehingga tidak menggambarkan perubahan jangka panjang dalam kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memilih PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang merupakan perusahaan BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga ketersediaan informasi lebih mudah diakses dan transparan, kemudian skala operasional yang signifikan memberikan pandangan yang komprehensif tentang keputusan strategi terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, Megautami (2019) menyatakan ikhtisar keuangan yang dipublikasi oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. masih belum sepenuhnya menghitung rasio-rasio keuangan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No: 100/MBU/2002. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., ADHI sampai dengan tahun 2022 baru mencantumkan rasio imbalan kepada pemegang saham atau *Return On Equity* (ROE) dan rasio lancar atau *Current Ratio* sedangkan untuk rasio imbalan investasi atau *Return On Investment* (ROI), rasio kas, *collection period*, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset belum dilakukan perhitungan oleh perusahaan.

Selain itu, PT Adhi Karya banyak terlibat secara langsung dengan pembangunan fisik yang berhubungan dengan konstruksi dan infrastruktur dalam negeri yang dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti proyek Jembatan Musi IV di Palembang yang resmi beroperasi pada tahun 2019, jembatan ini menghubungkan Jalan Slamet Riyadi dengan Kawasan Plaju di Seberang Ulu (PUPR, 2019). Kemudian, PT Adhi Karya juga terlibat dalam pembangunan MRT Jakarta Fase 2 proyek CP 201 untuk membangun Stasiun Thamrin dan Monas dengan jalur

sepanjang 2,7 kilometer. Dalam proyek ini PT Adhi membentuk konsorsium bersama Shimizu Corporation dengan target perampungan proyek Desember 2024 (Editor, 2020). Pada tahun 2021, PT Adhi Karya juga terlibat dengan pembangunan paket II Sirkuit Mandalika yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, jaringan jalan, normalisasi Sungai, serta pembangunan aliran air (Sugianto, 2021). Di tahun yang sama PT Adhi Karya menyelesaikan proyek kereta api ringan atau LRT (*Light Rail Transit*) yaitu, LRT Jabodebek yang resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023 (Karya, 2021). PT Adhi Karya (Persero) Tbk. di tahun 2023 juga terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana, ada tujuh proyek prasana pendukung dengan nilai total proyek yang digarap sekitar Rp 2,7 triliun (Yulianus, 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum, Selama, dan Saat Fase Pemulihan Pandemi Covid-19 Pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Periode 2018-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis tingkat kesehatan perusahaan yang dicerminkan dalam laporan keuangan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk periode 2018-2022 (sebelum, selama, dan saat fase pemulihan pandemi COVID-19) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 mengenai penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan kinerja keuangan dan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 ditinjau dari laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kembali tingkat kesehatan perusahaan yang dicerminkan dalam laporan keuangan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk periode 2018-2022 (sebelum, saat, dan fase pemulihan pandemi COVID-19) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 mengenai penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi. Disamping itu, penelitian ini diharapkan

juga mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai analisis laporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan perusahaan BUMN dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan perencanaan untuk perusahaan pada masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literature untuk melakukan penilian dan penulisan selanjutnya terutama dalam hal menganalisis rasio laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan berurutan. Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga memberikan gambaran umum tentang sistematika penulisan. Selanjutnya, bab kedua yaitu landasan teori yang mencakup penjabaran dari teori yang digunakan, tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya, dan kerangka penelitian yang membentuk dasar pemahaman bagi pembaca terkait konteks penelitian. Bab ketiga yaitu metode penelitian, bab ini memberikan rincian tentang jenis penelitian, sampel dan objek, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Kemudian, bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, bab ini

secara terperinci menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, pengukuran dan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian. Terakhir, bab kelima yaitu penutup yang merangkum kesimpulan dari penelitian, menyoroti keterbatasan penelitian, dan memberikan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.

